

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Sumber daya alam tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar yang dapat menjadi potensi dalam mendukung kegiatan produksi maupun konsumsi. Letak geografis yang strategis serta luas wilayah yang mencakup berbagai pulau turut memberikan keunggulan dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pariwisata (Fayyaza *et al.*, 2025).

Sejalan dengan berbagai potensi yang dimiliki tersebut, pembangunan ekonomi menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan taraf hidup. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan struktur ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta distribusi pendapatan yang lebih merata. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi

menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa (Aghion *et al.*, 2021).

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, pertumbuhan ekonomi menjadi aspek penting yang terus diperhatikan oleh setiap negara, termasuk Indonesia, karena berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada dasarnya, setiap negara berupaya mencapai kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dari waktu ke waktu (Todaro & Smith, 2015).

Dalam beberapa tahun terakhir, Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang relatif stabil, namun masih menghadapi persoalan struktural seperti ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dan kelompok masyarakat, sehingga manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata. Selain itu, dominasi sektor informal menunjukkan banyak tenaga kerja terserap pada pekerjaan berproduktifitas rendah dengan upah terbatas dan minim perlindungan sosial. Perlambatan produktivitas tenaga kerja juga menjadi kendala, sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif (Putri & Prasetyo, 2025).

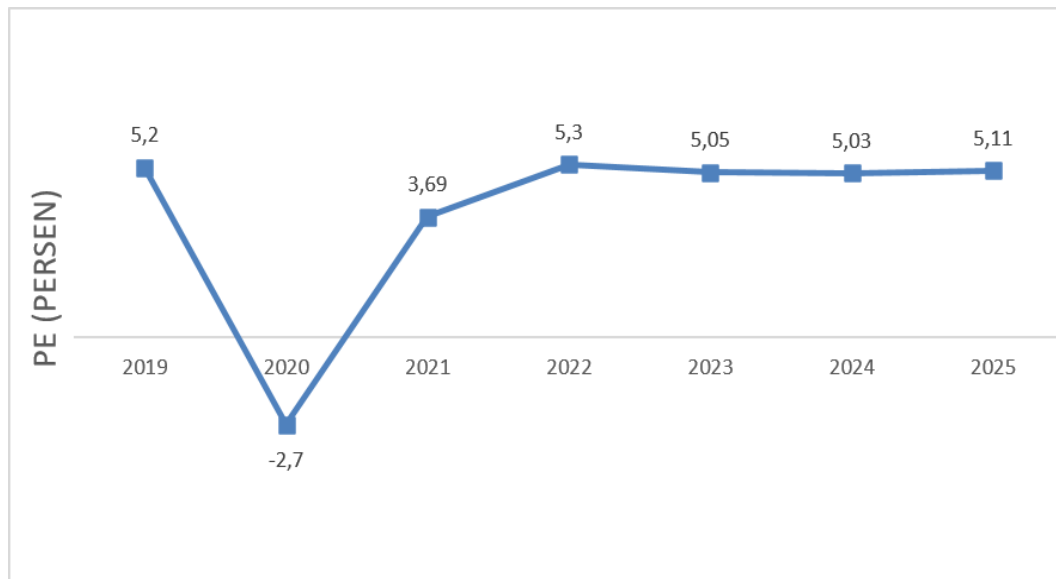
Struktur perekonomian Indonesia yang masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 53,18 persen dari Produk Domestik Bruto (Badan Pusat Statistik. 2023) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih banyak ditopang oleh aktivitas konsumsi domestik dibandingkan penguatan sektor produktif seperti investasi dan ekspor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung belum mampu mendorong

transformasi ekonomi secara optimal, terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan daya saing nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sektor-sektor produktif masih diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sejalan dengan itu, penelitian dari (Nursari & Pratama, 2025) menjelaskan bahwa peningkatan nilai tambah sektoral, produktivitas, investasi, dan transformasi ekonomi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing nasional.

Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian yang belum kuat dan kurang terdiversifikasi dapat menjadi hambatan bagi negara untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yaitu bertransformasi dari negara berpendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi (Daroen *et al.*, 2024).

Kondisi tersebut berkaitan dengan posisi Indonesia yang masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Dalam kajian ekonomi, hal ini sering dikaitkan dengan fenomena *middle income trap* (MIT), yaitu kondisi ketika negara berpendapatan menengah mengalami perlambatan pertumbuhan dan kesulitan untuk beralih menjadi negara berpendapatan tinggi (Ristianarko *et al.*, 2021). Indikasi menuju kondisi tersebut mulai terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah tahun 2012 diatas 6 persen mengalami penurunan dan kemudian cenderung bertahan di kisaran 5 persen.

Berikut Gambar 1.1 persentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 -2025 :



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2025 (Persen)

Sumber: *World Bank* dan BPS, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan dinamika yang berfluktuasi akibat perubahan kondisi global dan domestik. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif stabil di angka 5 persen. Namun, memasuki tahun 2020, perekonomian menghadapi tantangan besar akibat pandemi *COVID-19*, yang menyebabkan kontraksi tajam. Pertumbuhan ekonomi turun menjadi -2,7 persen, pertama kalinya sejak krisis 1998, seiring tekanan yang meluas pada berbagai aktivitas ekonomi. Pembatasan mobilitas pada masyarakat, seperti larangan kegiatan perjalanan, banyak penutupan fasilitas publik, dan pembatasan operasional pusat perbelanjaan, hal ini menurunkan konsumsi rumah tangga dan permintaan dalam negeri, sehingga dengan terganggunya kegiatan perekonomian banyak sektor jasa dan ritel mengalami penurunan penjualan. Selain itu, penurunan permintaan global turut menekan kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia, sehingga perekonomian

menghadapi tekanan secara menyeluruh yang dapat dirasakan setiap lapisan masyarakat (Sasmiharti & Karyati, 2024).

Pada tahun 2021, perekonomian mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen. Kondisi tersebut ditopang oleh langkah-langkah pemerintah melalui penerapan kebijakan fiskal ekspansif, termasuk peningkatan belanja negara untuk program infrastruktur dan belanja sosial, penyaluran bantuan langsung tunai subsidi (BLT) bagi rumah tangga, serta pemberian insentif fiskal seperti keringanan pajak, subsidi upah, dan dukungan modal bagi pelaku usaha UMKM, yang bertujuan menjaga daya beli dan mendukung keberlangsungan produksi. Kebijakan-kebijakan tersebut membantu mempertahankan konsumsi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Seiring dengan pelonggaran pembatasan kegiatan ekonomi pada bidang perdagangan, transportasi, dan sektor industri pengolahan mulai kembali bergerak, sehingga aktivitas ekonomi secara bertahap mengalami perbaikan (Putri *et al.*, 2025).

Kenaikan pada 2022 sebesar 5,3 persen, didorong oleh kenaikan harga komoditas global, terutama batu bara, minyak sawit, dan nikel, yang meningkatkan ekspor dan memperkuat neraca perdagangan. Normalisasi aktivitas masyarakat meningkatkan permintaan pada sektor jasa seperti transportasi, akomodasi, dan pariwisata, sementara investasi swasta ikut membaik. Pemulihan ekonomi terus mengalami peningkatan bertahap pada 2023 sebesar 5,05 persen dan sampai pada tahun 2025 sebesar 5,11 persen.

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia (United Nations, 2024), perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia

tidak terlepas dari peran tenaga kerja sebagai salah satu faktor utama dalam proses produksi barang dan jasa. Tenaga kerja tidak hanya berfungsi sebagai input produksi, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menghasilkan output yang mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun mencari pekerjaan. TPAK digunakan untuk melihat tingkat keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi serta ketersediaan tenaga kerja dalam proses produksi barang dan jasa (Munawir & Saharuddin, 2023).

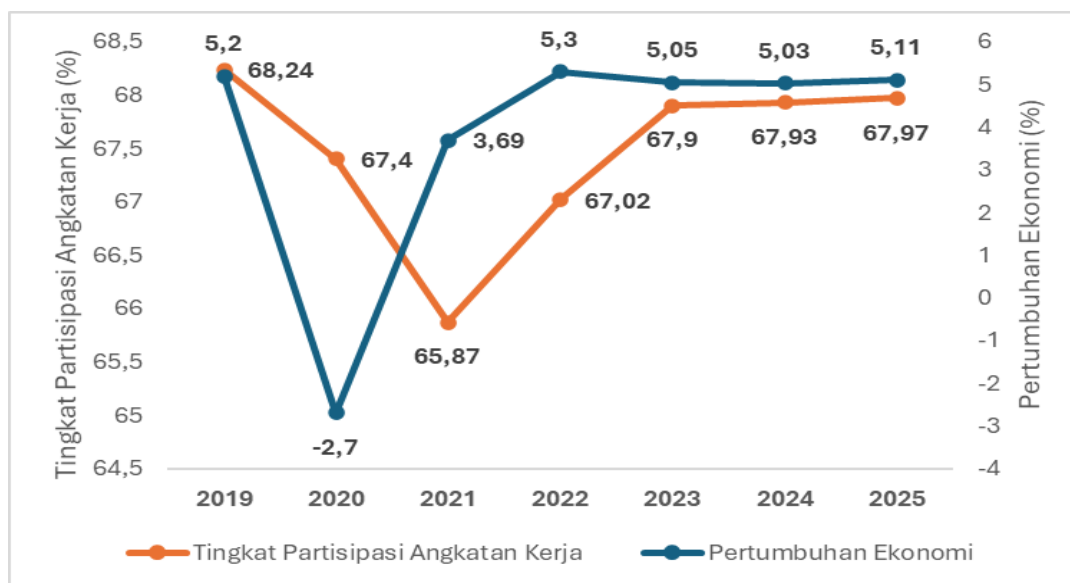
Namun demikian, tingginya keterlibatan tenaga kerja tersebut tidak selalu diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang merata di seluruh sektor ekonomi. Terutama pada sektor pertanian dan industri pengolahan (manufaktur), tenaga kerja masih didominasi oleh pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah (*low skilled labor*), sehingga memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan peningkatan efisiensi serta modernisasi proses produksi. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) meningkatkan kekhawatiran tergantikannya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif sederhana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan kompetensi agar tetap mampu beradaptasi dengan perubahan struktur ketenagakerjaan yang semakin berbasis teknologi,

disamping itu peningkatan jumlah angkatan kerja yang terus terjadi juga menuntut kemampuan pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja yang memadai agar tenaga kerja dapat terserap secara produktif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan mendorong investasi, menyederhanakan perizinan, dan memperluas kesempatan kerja melalui reformasi regulasi ketenagakerjaan (Republik Indonesia, 2020). Kebijakan ini diharapkan mampu membentuk lingkungan usaha yang lebih mendukung sehingga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja serta memperkuat struktur pasar kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika perekonomian. (Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, 2021; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022)

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan industri, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meminimalkan dampak perubahan struktur ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja *low skilled* (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023). Berikut data tpak di Indonesia:



Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2025 (Persen)
Sumber: *World Bank*, 2026

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, TPAK tercatat sebesar 68,24 persen yang mengindikasikan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Namun, angka tersebut menurun menjadi 67,40 persen pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi seiring terganggunya pasar tenaga kerja akibat pembatasan mobilitas, banyaknya usaha yang tutup, serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi partisipasi tenaga kerja, tetapi juga berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07 persen akibat berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi dan konsumsi (*International Labour Organization*, 2021). Selain itu, perubahan pola aktivitas ekonomi, termasuk pergeseran ke platform digital, turut memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan menyebabkan sebagian pekerja kesulitan kembali ke pasar kerja (*World Bank*, 2022). Dampak ini semakin terasa karena dominasi sektor informal yang lebih rentan terhadap guncangan, sehingga

banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat menurunnya aktivitas ekonomi (Suryahadi *et al.*, 2021).

Pada tahun 2021, TPAK kembali menurun menjadi 65,87 persen. Namun, di sisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia justru meningkat menjadi 3,69 persen. Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik yang diperkenalkan oleh Solow (1956), yang menjelaskan bahwa tenaga kerja termasuk salah satu faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, penurunan partisipasi angkatan kerja seharusnya diikuti oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diduga dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan pemulihan pasar tenaga kerja, sehingga TPAK belum pulih sepenuhnya meskipun perekonomian mulai membaik (Temenggung *et al.*, 2021).

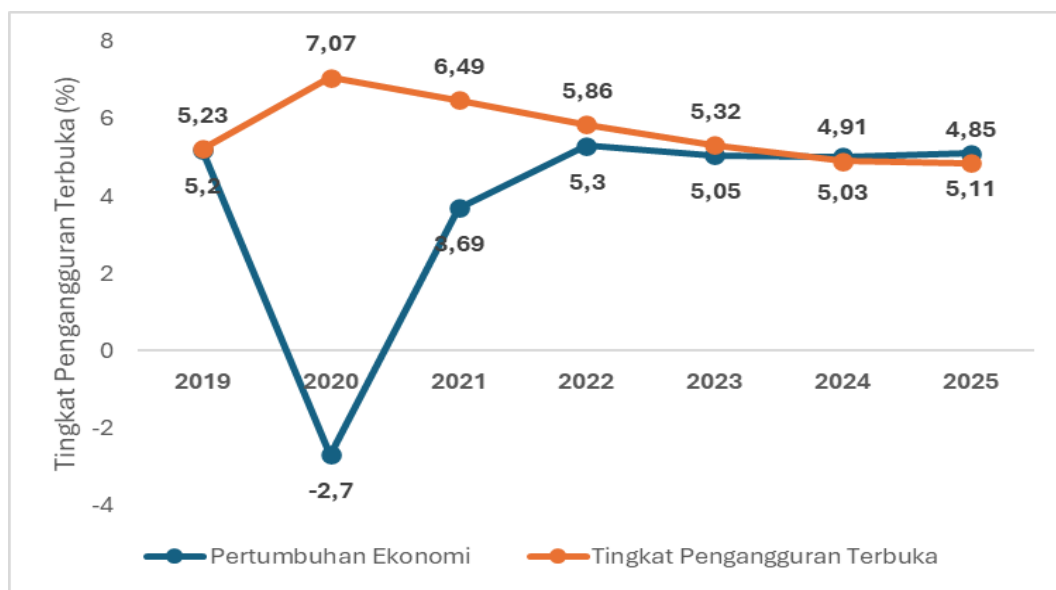
Pada tahun 2022, TPAK mulai meningkat menjadi 67,90 persen seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,30 persen. Pemulihan ini didorong oleh meningkatnya adaptasi dunia usaha terhadap kondisi pascapandemi yang turut memperluas kesempatan kerja (*Asian Development Bank*, 2023). Namun demikian, pada periode 2023-2025, TPAK kembali menunjukkan kecenderungan stagnan di kisaran 67,9 persen.

Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan daya serap pasar kerja dapat menimbulkan pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tingkat pengangguran umumnya lebih tinggi pada kelompok usia muda (15-24 tahun) karena keterbatasan pengalaman kerja dan rendahnya kemampuan bersaing di pasar kerja. Selain itu, masih terdapat ketidakselarasan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan tuntutan dunia industri, baik dari aspek keterampilan teknis maupun *soft skills*, sehingga perpindahan lulusan dari jenjang pendidikan ke dunia kerja belum berlangsung secara optimal dan berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja muda (Bell & Blanchflower, 2021).

Fenomena tingginya pengangguran usia muda juga terlihat dalam perbedaan kondisi antarwilayah. Provinsi dengan tingkat urbanisasi tinggi seperti Banten dan DKI Jakarta memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada Agustus 2025, TPT di Provinsi Banten mencapai 6,69 persen dan DKI Jakarta sebesar 6,05 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen. Kondisi ini mencerminkan tingginya arus urbanisasi yang tidak sepenuhnya diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja serta ketatnya persaingan di sektor formal (Badan Pusat Statistik., 2025).

Tingkat TPT yang tinggi menunjukkan banyak angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja. Pada Agustus 2025, TPT Indonesia tercatat sebesar 4,85 persen, yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar 5 orang masih termasuk pengangguran terbuka. Dengan jumlah angkatan kerja nasional lebih dari 155 juta orang, persentase ini setara dengan sekitar 7,46 juta orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan (Badan Pusat Statistik., 2025).



Gambar 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Grafik pada gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menunjukkan tren kecenderungan menurun. Pada 2019, TPT tercatat sebesar 5,23 persen, menandakan pasar tenaga kerja masih relatif stabil sebelum terjadi gangguan besar. Pada 2020, TPT meningkat tajam menjadi 7,07 persen, terutama disebabkan oleh pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan pembatasan sosial, penutupan sementara sejumlah bisnis, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar, khususnya di sektor jasa seperti perhotelan, transportasi, restoran, dan industri manufaktur yang mengalami penurunan permintaan. Banyak perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan tetap maupun kontrak, sehingga baik pekerja berpengalaman maupun tenaga kerja baru terkena dampak secara signifikan. Di luar dampak pandemi, pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja baru turut menambah tekanan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pada periode pascapandemi tahun 2021-2025, TPT menurun secara bertahap dari 6,49 persen pada tahun 2021 menjadi 4,85 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang meningkat menjadi 3,69 persen pada tahun 2021, mencapai 5,30 persen pada tahun 2022, dan relatif stabil di atas 5 persen hingga tahun 2025. Membaiknya aktivitas ekonomi mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama jasa, perdagangan, dan manufaktur, sehingga kesempatan kerja semakin luas dan jumlah pengangguran berangsur menurun (Antu *et al.*, 2023). Meskipun demikian, penurunan TPT belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih terbatasnya penyerapan tenaga kerja di sektor modern dan berbasis teknologi, serta tingginya pengangguran usia muda akibat keterbatasan pengalaman kerja dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri (*skill mismatch*) (Hasibuan & Handayan, 2025).

Hukum Okun menjelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan tingkat pengangguran mencerminkan semakin banyak tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan dalam proses produksi sehingga output barang dan jasa yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Hubungan ini didukung oleh penelitian Safrina & ratna (2023). yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian dari (Parulian *et al.*, 2025). yang menjelaskan dengan

tingginya tingkat pengangguran mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja sehingga menurunkan kinerja perekonomian secara agregat.

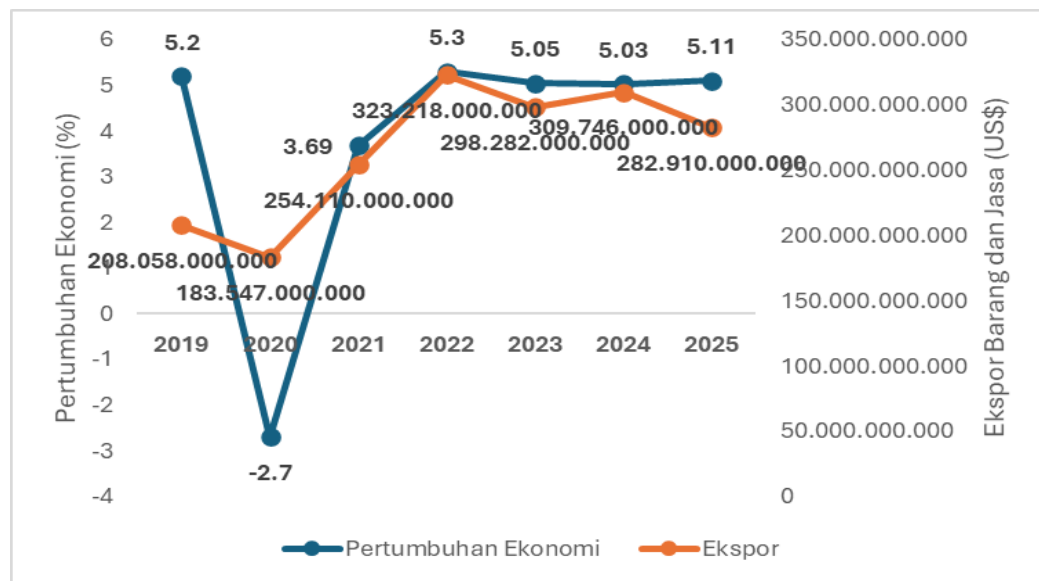
Aktivitas ekspor memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi karena membuka peluang bagi negara untuk menjangkau pasar global. Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional berupa penjualan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain dalam periode tertentu secara legal (Mahzalena & Juliansyah, 2019). Di Indonesia, ekspor secara konsisten memberikan kontribusi terhadap PDB dengan persentase yang tinggi pada tahun 2020 hingga 2025, menjadikannya komponen keempat terpenting pemasukan negara. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekspor berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia, membuka kesempatan bagi pengembangan sektor industri, serta memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional (Putri & Ibrahim, 2023).

Ekspor yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekspor barang dan jasa yang bersumber dari *World Bank* dan Badan Pusat Statistik. Ekspor barang dan jasa dalam penelitian ini menggambarkan keseluruhan nilai perdagangan keluar negeri yang dilakukan Indonesia. Ekspor barang yang dimaksud terutama mencakup komoditas unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO) dan lainnya. Sementara itu, ekspor jasa mencakup jasa transportasi, pariwisata, jasa keuangan, serta berbagai layanan lain yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional. Nilai ekspor tersebut menunjukkan peran sektor perdagangan luar negeri dalam menghasilkan devisa bagi perekonomian nasional, sekaligus mencerminkan keterhubungan aktivitas perdagangan Indonesia dengan pasar

internasional, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kinerja ekspor dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekspor Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, namun kinerjanya masih menghadapi berbagai tantangan. Struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer, seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan nikel, sehingga nilai ekspor nasional sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta kondisi permintaan pasar global. Ketergantungan tersebut menyebabkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu. Selain itu, perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor utama berpotensi menekan permintaan terhadap produk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara mitra dagang dan faktor-faktor eksternal lainnya (Ridwannulloh & Sunaryati, 2018).

Dalam upaya memperkuat peran ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Regulasi ini mengatur perizinan, kewajiban eksportir, serta mekanisme pelaksanaan ekspor guna menciptakan tata kelola ekspor yang lebih efektif dan transparan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional sehingga kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dapat semakin optimal (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023). Kondisi Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2019-2025 dilihat pada Gambar 1.4 berikut:



Gambar 1. 4 Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2019-2025 (US\$)

Sumber: *World Bank* dan *BPS*, 2026

Grafik pada gambar 1.4 Ekspor di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019 ekspor tercatat sebesar US\$ 208.058.000.000 tingginya nilai ekspor barang dan jasa Indonesia dipengaruhi oleh masih stabilnya permintaan pasar global terhadap komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit (CPO), dan nikel.

Fenomena penurunan tajam pada tahun 2020 terjadi akibat pandemi *COVID-19* yang menyebabkan terganggunya perdagangan internasional. Penerapan kebijakan *lockdown* di berbagai negara serta perlambatan ekonomi global mengakibatkan menurunnya tingkat konsumsi dan impor dunia sehingga berdampak pada melemahnya ekspor Indonesia. Kondisi tersebut turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar -2,7 persen (Novialumi *et al.*, 2022). Penurunan permintaan juga terjadi dari China sebagai salah satu mitra dagang utama, di mana aktivitas perdagangan antara Indonesia dan China melemah akibat perlambatan ekonomi selama pandemi

(Budiman *et al.*, 2022). Memasuki tahun 2021, kinerja ekspor Indonesia mulai pulih dan meningkat secara signifikan sebesar US\$ 254.110.000.000 seiring dengan membaiknya permintaan global. Peningkatan ini terutama ditopang oleh komoditas serta logam seperti nikel yang mengalami kenaikan harga di pasar global. Kenaikan harga dan permintaan komoditas tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan energi dan bahan baku (World Bank, 2022). sehingga sektor pertambangan dan penggalan menunjukkan pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Memasuki tahun 2022, ekspor Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun kebelakang dengan nilai ekspor barang dan jasa mencapai sekitar US\$323.218.000.000. Peningkatan tersebut diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,30 persen, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir (World Bank, 2023). Kenaikan yang signifikan tersebut di topang dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas global yang mencapai puncaknya, Selain itu, konflik Rusia dan Ukraina turut memberikan tekanan terhadap harga energi dunia sehingga memperkuat permintaan terhadap komoditas Indonesia, serta didukung oleh kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang meningkatkan nilai tambah ekspor (Pratiwi *et al.*, 2023). Namun, pada tahun 2023 nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan menjadi sekitar US\$298.282.000.000. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya harga komoditas global seiring dengan membaiknya kondisi pasokan di pasar internasional, sehingga negara-negara pengimpor mulai memperluas sumber pasokan komoditas dari berbagai negara pengekspor. Kondisi tersebut

menyebabkan permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia menurun akibat meningkatnya persaingan di pasar global. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh sebesar 5,05 persen, yang menunjukkan bahwa pelemahan kinerja ekspor tidak diikuti oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut. Pada tahun 2024 nilai ekspor Indonesia kembali mengalami peningkatan meskipun relatif terbatas, yaitu mencapai sekitar US\$309.746.000.000 dengan pertumbuhan ekonomi di 5,03 persen (*World Bank*, 2024).

Pada tahun 2025, kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia tercatat mengalami penurunan hingga mencapai US\$282.910.000.000. Meskipun demikian, perekonomian nasional pada periode yang sama justru menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,11 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelemahan pada sektor ekspor tidak selalu berbanding lurus dengan perlambatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui *Export-Led Growth Theory*, yang memandang ekspor sebagai salah satu faktor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, perluasan pasar, serta penguatan aktivitas ekonomi domestik. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, peran sektor eksternal dapat tertutupi oleh kuatnya permintaan dari dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 lebih banyak didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta konsumsi pemerintah yang tetap stabil, sehingga mampu mempertahankan

pertumbuhan ekonomi meskipun nilai ekspor mengalami penurunan (Badan Pusat Statistik, 2026).

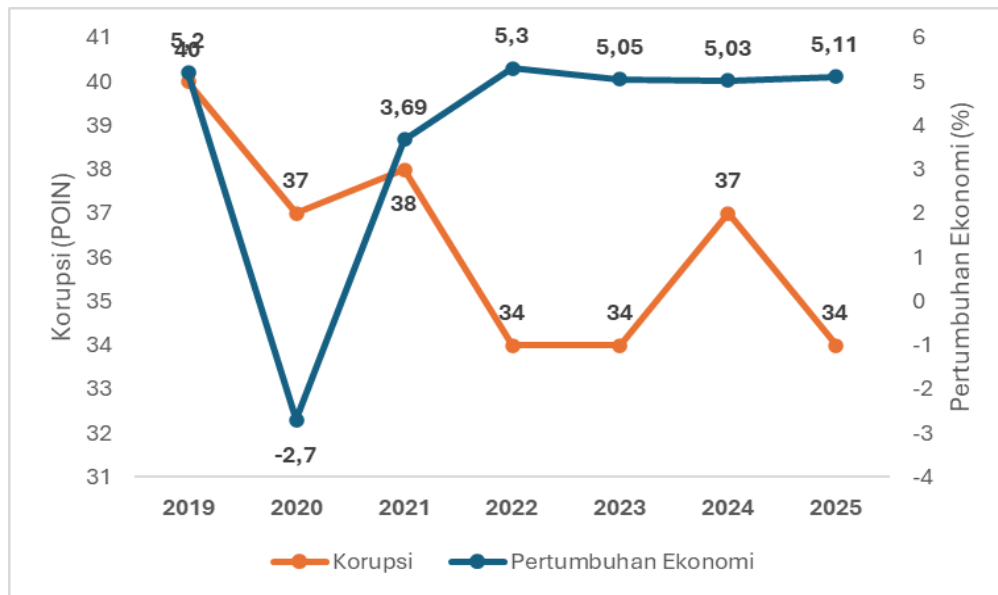
Meskipun kinerja ekspor Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor global, seperti dinamika permintaan internasional dan kondisi perekonomian dunia, faktor domestik juga memegang peran penting dalam menentukan optimalisasi ekspor barang dan jasa. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah tingkat korupsi karena berkaitan dengan efisiensi kegiatan ekonomi dan kualitas kelembagaan dalam mendukung perdagangan internasional. Praktik korupsi dapat meningkatkan biaya transaksi, memperlambat proses birokrasi, dan menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas perdagangan sehingga berpotensi menurunkan kinerja ekspor suatu negara (Yunan, 2023).

Tingkat korupsi suatu negara umumnya diukur menggunakan *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang dikembangkan oleh *Transparency International*. Indeks ini mengukur persepsi tingkat korupsi di sektor publik berdasarkan penilaian para ahli dan pelaku usaha internasional. CPI menggunakan skala 0-100, di mana skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi, sedangkan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah (*Transparency Internasional*, 2023).

Permasalahan korupsi di Indonesia masih menjadi perhatian karena berdampak pada pembangunan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara. Kondisi tersebut tercermin dari berbagai kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar dan terus terjadi dari waktu ke waktu.

Praktik korupsi telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang di Indonesia dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Salah satu kasus yang menjadi perhatian pada awal era reformasi adalah penyimpangan penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) periode 1997-1998 dengan total kerugian negara mencapai Rp138,44 triliun (Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, 2021). Pada beberapa tahun terakhir, nilai kerugian negara akibat korupsi masih menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Tbk periode 2015-2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun, yang menjadi kerugian negara terbesar dalam sejarah penanganan perkara korupsi di Indonesia (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2024). Selain itu, kasus korupsi PT Duta Palma Group juga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp78 triliun (Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, 2022).

Fenomena tersebut sejalan dengan Teori Institusi yang di perkenalkan oleh North (1990) yang menjelaskan bahwa kualitas institusi memengaruhi aktivitas ekonomi. Institusi yang lemah, termasuk tingginya praktik korupsi, dapat meningkatkan biaya transaksi dan menghambat perdagangan internasional serta pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian (Fitri & Lutfi, 2024). Juga menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara berkembang ASEAN, yang mengindikasikan bahwa penurunan tingkat korupsi diikuti oleh semakin baiknya kinerja pertumbuhan ekonomi. Berikut data korupsi di Indonesia:



Gambar 1. 5 Korupsi Tahun 2019-2025 (Poin)

Sumber: *Transparency International*, 2026

Grafik pada Gambar 1.5 menunjukkan bahwa *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia mengalami tren fluktuasi cenderung menurun yang dipengaruhi kondisi kelembagaan dan ekonomi. Pada 2019 CPI mengalami kenaikan sebesar 40 poin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi anggaran, serta digitalisasi layanan publik yang mulai mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi.

Namun pada 2020, CPI menurun menjadi 37 akibat pandemi *COVID-19* yang meningkatkan risiko penyimpangan anggaran darurat dan melemahkan pengawasan, diperparah oleh tekanan ekonomi. Tahun 2021 CPI sempat naik menjadi 38, tetapi kembali turun ke 34 pada 2022 dan stagnan pada 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia justru meningkat menjadi 5,30 persen dari 3,69 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penguatan aktivitas ekonomi

nasional lebih didominasi oleh faktor pemulihan ekonomi dan tingginya kinerja sektor komoditas, sehingga mampu mengimbangi dampak pelemahan kualitas tata kelola yang tercermin dari menurunnya skor *Corruption Perception Index* (World Bank, 2023 ; Pratiwi *et al.*, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sebesar 5,05% meskipun skor CPI masih berada pada 34 poin.

Pada 2024, CPI meningkat kembali menjadi 37, mengindikasikan adanya perbaikan melalui penguatan kebijakan antikorupsi dan pengawasan yang lebih ketat sehingga tindakan korupsi mulai dapat ditekan. Namun pada tahun 2025 *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 34 poin. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menilai kondisi ini dipengaruhi oleh melemahnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan pada masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, masih terdapat praktik konflik kepentingan, seperti pemberian jabatan strategis kepada pihak yang memiliki kedekatan politik. Meskipun demikian, pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi Indonesia justru meningkat menjadi 5,11 persen dari 5,03 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 masih lebih banyak ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas ekonomi domestik, sehingga dampak penurunan skor *Corruption Perception Index* (CPI) belum terlihat secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Liputan, 2025).

Sejauh ini telah dilakukan sejumlah penelitian yang menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, ekspor,

dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada periode waktu yang berbeda serta mencakup wilayah penelitian yang beragam. Santoso *et al.* (2024) menemukan bahwa TPAK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Sebaliknya, Nadilla dan Ichsan (2022) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan di Indonesia. Namun, Munawir dan Saharuddin (2023) menemukan bahwa TPAK tidak berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Aceh. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang, *et al.* (2026). menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, Munawir & Saharuddin, (2023). menunjukkan bahwa TPT tidak berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Aceh. Di sisi lain, Shelisa dan Setyanto (2024) menemukan bahwa TPT justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang relatif searah, namun masih terdapat perbedaan terkait pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Adnan *et al.* (2022). Dewi *et al.* (2022). serta Nadilla & Ichsan. (2022). menemukan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Namun demikian, Thoha & Restikara. (2024). menunjukkan bahwa ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga mengindikasikan bahwa meskipun ekspor

umumnya berdampak positif, pengaruhnya dapat berbeda tergantung pada konteks wilayah dan karakteristik ekonomi masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah *et al.* (2025). dan Marista & Farah (2024) menemukan bahwa korupsi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Fitri & Lutfi. (2024). menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan di negara-negara ASEAN, yang mengindikasikan bahwa penurunan korupsi dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Sujidno & Febriani. (2023). menemukan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya TPAK, TPT, ekspor, dan korupsi. Namun, penelitian yang menggabungkan keempat variabel tersebut dalam satu model analisis masih terbatas, karena sebagian besar studi sebelumnya bersifat parsial dengan kombinasi variabel yang berbeda. Perbedaan metode, periode, dan cakupan wilayah juga menyebabkan hasil penelitian yang beragam. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian berupa belum adanya kajian yang secara simultan menguji pengaruh TPAK, TPT, ekspor, dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia..

Urgensi penelitian ini muncul karena pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersifat multidimensi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah angkatan kerja besar menghadapi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, yang tercermin dari fluktuasi TPAK dan

TPT dalam beberapa tahun terakhir (BPS). Di sisi lain, kinerja ekspor masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, namun menghadapi tantangan daya saing, sementara korupsi masih menjadi isu struktural yang dapat menghambat efisiensi ekonomi dan kepercayaan investor. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh TPAK, TPT, ekspor, dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian yang berubah dari waktu ke waktu membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ekspor, dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

4. Bagaimana pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ekspor, dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengetahui pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ekspor, dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan, mengenai pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ekspor, dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
- b. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ekspor, dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai sumber informasi dalam memahami keterkaitan yang berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Tenaga kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ekspor, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi.